

Penerapan peninjauan kembali atas dasar alasan adanya dua putusan peninjauan kembali dalam perkara peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Kasus Perkara Peninjauan Kembali No.I54PK/TUN/2010 antara PT. Lippo Karawaci, Tbk melawan Tresna Hidayat). = Implementation judicial review based on the two contradiction judicial review decision in the State Administrative Court based on the Supreme Court Circular Letter No. 10 year 2009 (Case Studies on Supreme Court Decision No.154PK/TUN/2010 between PT. Lippo, Tbk against Tresna Hidayat)

Fahdrian Iqbal, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20334497&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Penelitian di dalam skripsi ini adalah mengenai Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara/ Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Menurut Pasal 132 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali adalah suatu bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Di dalam penelitian diketemukan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang menyatakan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali dapat diterima apabila terdapat dua putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain.

*Research in this thesis is on the judicial review of judicial review within the State Administrative Court. This research is a normative legal research using library research approach. According to Article 132 of Law No. 5 of 1986 regarding the State Administrative Tribunal that the decision has gained legal force that can still be filed to the Supreme Court judicial review. Judicial review is a form of extraordinary legal remedies against court decisions that have obtained legal binding, and the parties concerned may submit the review to the Supreme Court, if there are any matters or circumstances specified in statute. According to Article 24 Paragraph (2) of Law No.48 of 2009 on Judicial Power states against the decision of judicial review can not be judicial review. In the study found that the decision of the Supreme Court-granted judicial review against the decision of judicial review in the State Administrative Court. The legal basis used was the page in the case of Supreme Court Circular Letter No.10 of Filing Petition stating judicial review judicial review against the decision can be accepted if there are two judicial review decisions that contradict each other.*